

Regional Development Strategy in the South Cross Road Network of Cilacap

Strategi Pembangunan dan Pengembangan Wilayah di Kawasan Jaringan Jalan Lintas Selatan Kabupaten Cilacap

Muhammad Husnul Maab

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cilacap

Abstrak:

Pembangunan Nasional Jaringan Jalan Lintas Selatan yang telah dilaksanakan pada Trase Batas Jawa Barat–Patimuan–Bantarsari merupakan salah satu peluang bagi Pemerintah Kabupaten Cilacap untuk melakukan pengembangan wilayah. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu diwujudkan keterpaduan pembangunan pada kebijakan sektoral dan kewilayahan. Dengan metode *kernel density estimation* didapatkan estimasi dari fungsi densitas dalam area penelitian, meliputi kemampuan lahan, sebaran fasilitas, potensi unggulan, serta tingkat aksesibilitas wilayah. Dengan dipadukan dengan berbagai dokumen tata ruang dan rencana pembangunan, diperoleh hasil penelitian berupa strategi pembangunan dan pengembangan wilayah di area sekitar Jaringan Jalan Lintas Selatan Trase Batas Jawa Barat–Patimuan–Bantarsari berbasis ekonomi lokal melalui kegiatan agrikultur, perikanan, dan Usaha Kecil Mikro Menengah. Adapun yang masih menjadi persoalan dalam pengembangan wilayah, yaitu masalah aksesibilitas kawasan dan kebutuhan pemenuhan sarana kesehatan masyarakat.

Kata-Kata Kunci: Pembangunan Sektoral, Pengembangan Wilayah, Ekonomi Lokal

Abstract:

The national development of “Jaringan Jalan Lintas Selatan” on the West Java’s Boundary - Patimuan-Bantarsari is one of the opportunities for the Cilacap Regency to develop regional development. It is necessary to combine development planning in sectoral and regional policies. Using the kernel density estimation method, an estimate of the density function in the research area is obtained, including land capability, distribution of facilities, superior potential, and the level of regional accessibility. By combining with various spatial documents and development plans, the research results obtained in the form of regional development strategies around the “Jaringan Jalan Lintas Selatan” based on the local economy through agricultural activities, fisheries, and Micro, Small and Medium Enterprises. As for what is still a problem in regional development, are the problem of regional accessibility and the need to fulfil public health facilities.

Keywords: Sectoral Development, Regional Development, Local Economy

Korespondensi:

Muhammad Husnul Maab (keboedan86@gmail.com)

Pendahuluan

Dinamika dalam pembangunan di daerah (*Regional Development*) adalah merencanakan tujuan pengembangan wilayah yang sesuai kebutuhan, dengan kondisi wilayah yang berbeda-beda (alasan ekonomi) dan potensi setiap daerah yang berbeda-beda, seperti potensi sumber daya alam. Pembangunan wilayah merupakan suatu proses yang digunakan untuk membangun berbagai potensi yang dimiliki oleh masing-masing wilayah untuk diberdayakan secara terpadu demi mewujudkan kesejahteraan rakyat (Zai, 2018). Mengingat dalam pengembangan wilayah perlu adanya keserasian antarkawasan, keterpaduan antarsektor pembangunan, maka pengembangan wilayah harus bersifat global dengan mempertimbangkan keterkaitan antarwilayah dan antarsektor dengan berbagai dampak yang akan timbul untuk mengembangkan keseluruhan sektor sebagai satu kesatuan dalam rangka pemerataan pembangunan (Zai, 2018). Prinsip-prinsip dasar dalam pengembangan wilayah (Wenny Widya Wahyudi et al., 2020) adalah (1) *growth center* yang tidak hanya bersifat internal wilayah, akan tetapi mampu memperhatikan sebaran pertumbuhan yang dapat ditimbulkan (*spread effect*); (2) kerjasama pengembangan antar daerah; dan (3) pola pengembangan wilayah bersifat integral melalui pendekatan kesetaraan.

Secara spasial, pengembangan wilayah Kawasan JJLS di Kabupaten Cilacap berkaitan erat dengan kebijakan tata ruang Nasional, Provinsi, dan Kabupaten. Sedangkan secara sektoral, berhubungan dengan dokumen rencana pembangunan Nasional dan Daerah, baik jangka panjang maupun jangka menengah. Idealnya kebijakan spasial (regulasi tentang penataan ruang) menjadi pedoman bagi kebijakan sektoral, yang kemudian akan diakomodir dalam kebijakan perencanaan kabupaten dengan mengacu pada kebijakan perencanaan di tingkat nasional dan provinsi. Kebijakan spasial berisi tentang perwujudan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan dengan sifat komplementer yang merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Selanjutnya pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja melengkapi dengan kemudahan berusaha dan peningkatan iklim investasi. Arah kebijakan spasial tersebut diimplementasikan pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional yang

Korespondensi:

Muhammad Husnul Maab (keboedan86@gmail.com)

tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017, dengan kebijakan terkait peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan berhierarki serta peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah nasional.

Kebijakan pengembangan wilayah perlu disusun agar pembangunan daerah dapat dilaksanakan secara efisien, efektif, terpadu dan sinergis dalam memanfaatkan berbagai sumber daya, sehingga tercipta kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas dan kemajuan wilayah serta mengurangi kesenjangan antar wilayah (Mayulu & Daru, 2020). Selain itu, hal ini juga dilakukan guna mengantisipasi terjadinya disparitas dalam pertumbuhan pembangunan wilayah, sehingga timbul kesenjangan pembangunan dan pertumbuhan antar wilayah (Triyanto & Keban, 2019). Hal lain yang mendorong terjadinya disparitas pertumbuhan wilayah adalah: (1) migrasi penduduk usia produktif ke daerah yang telah berkembang; (2) pesatnya investasi di daerah yang telah berkembang; (3) kebijakan pemerintah yang cenderung memilih pengembangan, bukan pembangunan dari awal; dan (4) pola bisnis yang didominasi oleh sektor industri di daerah yang telah berkembang (Srivani et al., 2018). Untuk meminimalisir terjadinya disparitas pertumbuhan wilayah, maka suatu daerah harus memiliki minimal tiga pilar pembangunan wilayah (Nugroho, 2018), yaitu: (1) pilar keunggulan komparatif (*imperfect mobility of factor*) yang bersifat khas atau endemik; (2) pilar aglomerasi (*imperfect divisibility*) yang berpengaruh terhadap peningkatan ekonomi secara spasial; dan (3) pilar transportasi (*imperfect mobility of good and service*) yang berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi.

Kabupaten Cilacap merupakan daerah terluas di antara kabupaten-kabupaten lain di Jawa Tengah, luas Kabupaten Cilacap sebesar 6,48% dari luas wilayah Jawa Tengah dengan luas wilayah 2.253,61 Km² (termasuk Pulau Nusakambangan seluas 11.511 ha). Kabupaten Cilacap terletak diantara 108°4' 30" – 109°30' 30" garis Bujur Timur dan 7° 30' - 7° 45' 20" garis Lintang Selatan. Secara umum kondisi topografi Kabupaten Cilacap bila dilihat dari arah barat laut merupakan kawasan pegunungan dengan ketinggian rata-rata lebih dari 400 meter di atas permukaan laut (mdpl) dengan puncak tertinggi berada di

Gunung Subang (1.210 meter dpl) yang berada di Kecamatan Dayeuhluhur. Selanjutnya ke arah tenggara terbagi menjadi dua kawasan bentang alam, di bagian utara berupa pegunungan dan bagian selatan berupa dataran miring landai ke arah barat daya-selatan, berelevasi kurang dari 100 meter dpl dan berbatasan dengan Kawasan Segara Anakan. Bagian paling timur berupa dataran dan di bagian selatan berbatasan langsung dengan Samudera Hindia.

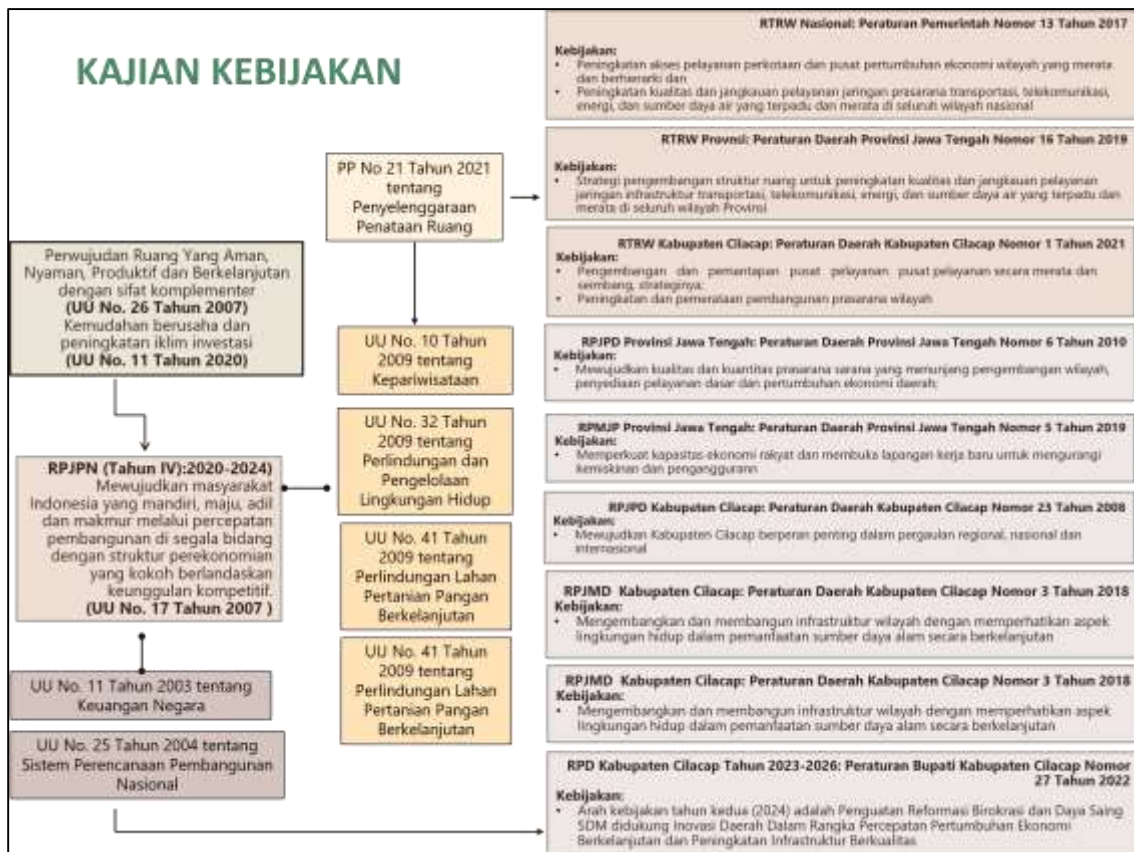
Secara ekonomi, Kabupaten Cilacap berperan sebagai penggerak pertumbuhan (*prime over*) bagi regional Barlingmascakeb (Kabupaten Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, dan Kebumen). Keberadaan beberapa obyek vital nasional di wilayah Kabupaten Cilacap seperti PLTU, aktivitas pertambangan, kilang minyak, berbagai jenis industri besar, menengah, maupun kecil telah mendorong terbukanya kesempatan kerja dan daya tarik penduduk dari daerah lain. Keterkaitan juga terjadi dalam bentuk sirkulasi sumber bahan baku, yang mendorong tumbuhnya beragam industri dalam memproduksi barang primer, sekunder, dan tersier. Pada akhirnya, keterkaitan ekonomi ini mampu mendorong terhadap pertumbuhan PDRB baik secara lokal di tiap kabupaten maupun secara regional di tingkat Provinsi Jawa Tengah. Keberadaan kilang minyak sangat berpengaruh terhadap PDRB Cilacap, maka dalam penghitungan PDRB dibedakan menjadi PDRB dengan migas dan PDRB tanpa migas. Dilihat PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Cilacap dengan Migas tahun 2017-2021, laju pertumbuhan yang cenderung positif, pertumbuhan PDRB dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dalam kurun waktu empat tahun, hanya saja pada tahun 2020 mengalami penurunan sebagai dampak pandemi Covid-19.

Pembangunan Jaringan Jalan Lintas Selatan (JJLS) merupakan jalan strategis nasional yang menghubungkan 5 (lima) wilayah provinsi, yaitu Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur, guna mengoptimalkan perkembangan Wilayah Pulau Jawa bagian selatan. Oleh karena jalan tersebut melintasi wilayah Kabupaten Cilacap, maka melalui Keputusan Bupati Cilacap Nomor 590/750/19/Tahun 2020 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jaringan Jalan Lintas Selatan Provinsi Jawa Tengah di Kabupaten Cilacap, Pemerintah Kabupaten

Cilacap bermaksud mendorong upaya tersebut dengan cara menyediakan infrastruktur aksesibilitas wilayah yang memadai. Pembangunan ini, selanjutnya oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap dimanfaatkan untuk beberapa hal. *Pertama*, merangsang pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur lainnya di wilayah Kabupaten Cilacap. *Kedua*, mengembangkan daerah-daerah yang tertinggal sesuai dengan potensinya. *Ketiga*, mengurangi kesenjangan antar wilayah. *Keempat*, mempertahankan dan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*). Adapun realisasi perencanaan pembangunan ini perlu disusun secara komprehensif, yang memperhatikan aspek sektoral dan aspek spasial. Antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tentu memiliki arah yang jelas dalam melaksanakan pembangunan. Akan tetapi apabila tidak dipadukan di antara keduanya, dimungkinkan terjadi tumpang tindih pembangunan, atau benturan tujuan pembangunan dalam satu wilayah.

Sehubungan dengan hal tersebut, kajian tentang strategi pembangunan dan pengembangan wilayah di kawasan JJLS Kabupaten Cilacap perlu dilakukan guna mewujudkan keterpaduan kebijakan pembangunan di wilayah jaringan jalan lintas selatan yang lebih terintegrasi antara kebijakan sektoral dan kewilayahan dalam rangka pencapaian target pengembangan wilayah, sehingga dapat mengoptimalkan integrasi antarsektor dan antarwilayah dalam upaya memaksimalkan potensi perekonomian yang ada untuk mendorong terciptanya kutub pertumbuhan/pusat pengembangan perekonomian baru guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi bagi wilayah di sekitarnya (Muliani et al., 2018).

Gambar. 1 Diagram Alur Kebijakan Spasial dan Sektorial Pengembangan Wilayah Kawasan JJS di Kabupaten Cilacap



Sumber: Kumpulan Peraturan

Dalam rangka mewujudkan cita-cita RPJPN Tahun IV(2020-2024) berupa masyarakat yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif, khususnya di Kabupaten Cilacap, maka dalam hal penyelenggaraan penataan ruang, perlu ditetapkan kebijakan yang sejalan dengan tujuan nasional tersebut. RTRW Nasional menetapkan kebijakan peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang terpadu dan merata. Kebijakan ini diinterpretasikan oleh RTRW Provinsi dengan strategi pengembangan struktur ruang untuk peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan, dalam bentuk sarana dan prasarana yang menunjang pengembangan wilayah, penyediaan pelayanan dasar dan pertumbuhan

ekonomi daerah. Adapun Kabupaten Cilacap merealisasikan strategi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tersebut dengan arah kebijakan percepatan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan peningkatan infrastruktur berkualitas, berlandaskan reformasi birokrasi dan daya saing SDM dan didukung inovasi daerah. Infrastruktur daerah dibangun dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup dan memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Kernel Density estimation merupakan metode non-parametrik yang digunakan untuk mendapatkan estimasi dari fungsi densitas (digunakan untuk menganalisis dan pola persebaran kepadatan atau sebaran sarana-prasarana permukiman) dalam suatu area (Chen, 2017). Pada kajian ini metode *karnel density* digunakan untuk melihat kondisi eksisting pengumpulan sarana-prasarana permukiman dan implikasi penetapan pusat-pusat pelayanan permukiman yang ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah di wilayah kajian, melihat kesesuaian eksisting dengan yang diharapkan, sekaligus melihat kecenderungan pengembangan wilayah di kawasan Jaringan Jalan Lintas Selatan Trase Batas Jawa Barat – Patimuan – Bantarsari Kabupaten Cilacap. Asumsi utama yang digunakan dalam kajian ini adalah semakin banyak fasilitas yang terkumpul dalam satu area, maka tingkat kekotaannya akan semakin tinggi (Hashimoto et al., 2016).

Data primer yang dibutuhkan berupa data sebaran sarana-prasarana pemukiman yang berupa titik koordinat/point didapat dari ekstraksi *Google Maps* (eksisting) (Indrawati & Cahyono, 2018). Analisis dilakukan dengan bantuan program *ArcGIS pada Arc Toolbox - Spatial Analyst - Kernel Density*. Adapun data sekunder dikumpulkan untuk memperdalam analisis yang terkait dengan kebijakan-kebijakan baik kebijakan spasial maupun sektoral (Muktiali, 2017) berupa kemampuan lahan kawasan, fungsi kawasan, aksesibilitas serta potensi pertanian. Selain itu perolehan data sekunder juga dilakukan untuk memperoleh data tematik (Mulyati, 2018) yang dibutuhkan dalam analisis potensi dan permasalahan pengembangan di wilayah JJLS

Sebaran Fasilitas Pemukiman

Sebaran fasilitas pemukiman ini meliputi sebaran fasilitas perdagangan dan jasa, kantor pemerintah, ruang terbuka hijau, peribadatan, kesehatan, dan pendidikan. Sebaran fasilitas dapat diklasifikasikan menjadi 5 (lima) kategori kepadatan, mulai dari kepadatan sangat tinggi sampai dengan kepadatan yang sangat rendah, dengan batasan klasifikasi sebagai berikut:

Tabel.1 Kategori Kepadatan Fasilitas Pemukiman

Kategori	Jumlah Fasilitas	Jumlah Bangunan
Sangat Rendah	0 - 35	0 - 1.537
Rendah	35 - 110	1.537 - 3.990
Sedang	110 - 245	3.990 - 7.208
Tinggi	245 - 493	7.208 - 12.313
Sangat Tinggi	> 493	>12.313

Sumber: Data Primer diolah

Berdasarkan hasil analisis, maka sebaran fasilitas pemukiman di kawasan pengembangan wilayah JJLS Kabupaten Cilacap dapat kategorikan kedalam kawasan dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi dan tingkat kepadatan fasilitas yang rendah, dengan rincian sebaran sebagai berikut:

Tabel. 2 Data Persebaran Fasilitas dan Bangunan di Wilayah JJLS

Kecamatan/ Desa	Kepadatan Fasilitas					Kepadatan Bangunan				
	SR	R	S	T	ST	SR	R	S	T	ST
Kec. Bantarsari	13 %	50 %	13 %	0%	25 %	0%	0%	0%	38 %	63 %
Desa Bantarsari					V					V
Desa Rawajaya			V							V
Desa Binangun		V								V
Desa Bulaksari		V								V
Desa Kamulyan					V					V
Desa Cikedondong		V							V	
Desa Kedungwadas		V							V	
Desa Citembong	V								V	
Kec.	7%	50	7%	14	21	0%	0%	7%	50	43

Kecamatan/ Desa	Kepadatan Fasilitas					Kepadatan Bangunan				
	SR	R	S	T	ST	SR	R	S	T	ST
Gandrungmangu		%		%	%				%	%
Desa Cisumur		V							V	
Desa Sidaurip		V							V	
Desa Gintungreja			V						V	
Desa Layansari				V						V
Desa Gandrungmanis					V					V
Desa Bulusari					V					V
Desa Gandrungmangu					V					V
Desa Wringinharjo		V							V	
Desa Karanganyar		V							V	
Desa Muktisari				V						V
Desa Kertajaya		V							V	
Desa Cinangsi		V								V
Desa Karanggintung		V							V	
Desa Rungkang	V							V		
Kec. Kedungreja	9%	55%	0%	36%	0%	0%	0%	0%	91%	9%
Desa Sidanegara		V							V	
Desa Tambakreja		V							V	
Desa Kaliwungu		V							V	
Desa Bumireja		V							V	
Desa Jatisari				V					V	
Desa Ciklapa				V					V	
Desa Bangunreja				V					V	
Desa Kedungreja				V					V	
Desa Tambaksari		V								V
Desa Rejamulya		V							V	
Desa Bojongsari	V								V	
Kec. Patimuan	0%	29%	57%	14%	0%	0%	14%	0%	71%	14%
Desa Rawaapu		V							V	
Desa Sidamukti			V						V	
Desa Purwadadi			V						V	
Desa Cimrutu		V					V			
Desa Patimuan				V						V
Desa Cinyawang			V						V	
Desa Bulupayung			V						V	

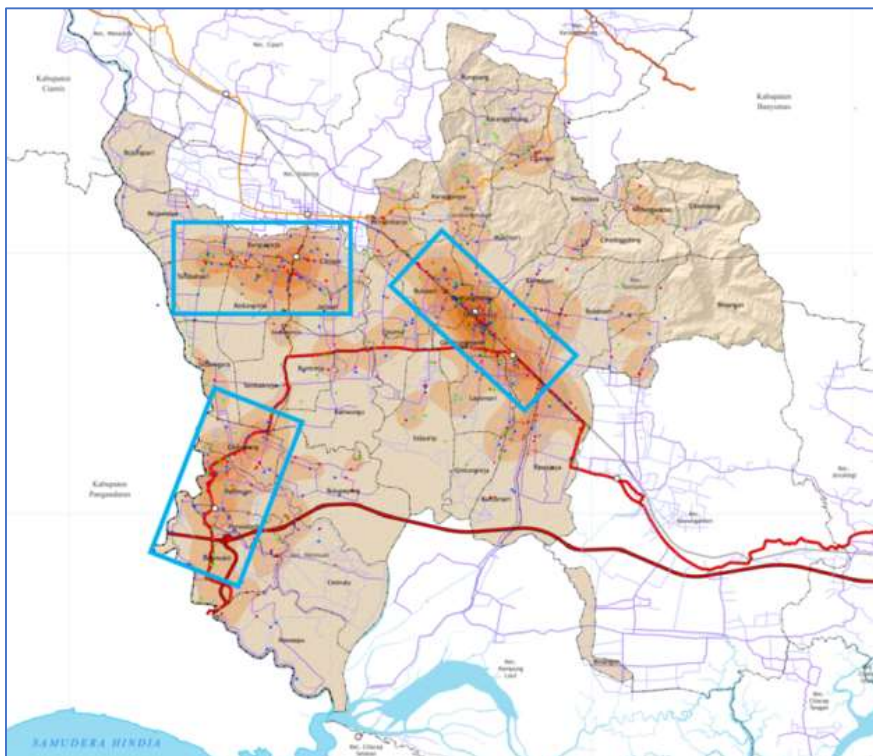
Kecamatan/ Desa	Kepadatan Fasilitas					Kepadatan Bangunan				
	SR	R	S	T	ST	SR	R	S	T	ST
Rata-rata	7%	46	19	16	12	0%	4%	2%	62	32
		%	%	%	%				%	%

Ket. : SR= Sangat Rendah; R= Rendah; S= Sedang; T= Tinggi; ST= Sangat Tinggi

Sumber: Data Primer diolah

Kepadatan fasilitas dan kepadatan bangunan sebagaimana sebaran data di atas, jika dipadukan dengan peta pengembangan kawasan JJLS, maka dapat diketahui adanya intensitas kegiatan yang ada di lokasi perencanaan pengembangan wilayah. Dalam hal ini tampak bahwa konsentrasi fasilitas dengan tingkat kerapatan “sangat tinggi” masih berpusat pada ibukota kecamatan. Sedangkan rata-rata sebaran fasilitas dan kepadatan penduduk terlihat bahwa setiap kecamatan masih kekurangan fasilitas dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi.

Gambar. 2 Peta Sebaran Kepadatan Fasilitas dan Bangunan



Kondisi kurangnya fasilitas di wilayah pinggiran disebabkan karena pembangunan fasilitas yang terpusat pada pusat kegiatan kecamatan,

sedangkan belum semua desa memiliki fasilitas yang mendukung aktivitas masyarakat.

Tabel. 3 Sebaran Fasilitas di Kawasan Pengembangan

Fasilitas	Kecamatan								Total	
	Bantarsari		Gandrung		Kedungreja		Patimuan			
Kesehatan	29	9%	53	10%	9	3%	10	3%	101	7%
Pendidikan	87	27%	165	30%	107	32%	94	33%	453	30%
Peribadatan	25	8%	30	5%	25	7%	29	10%	109	7%
Pemerintahan	64	20%	79	14%	54	16%	53	18%	250	17%
Perdagangan & Jasa	63	19%	99	18%	61	18%	66	23%	289	19%
Ruang Terbuka Hijau	57	18%	124	23%	78	23%	37	13%	296	20%
Total	325	100%	550	100%	334	100%	289	100%	1.498	100%

Sumber: Data Primer diolah

Secara umum, fasilitas yang paling banyak di kawasan pengembangan JLS adalah fasilitas pendidikan (30%), dan kawasan ruang terbuka hijau (20%). Fasilitas pendidikan menjadi fasilitas yang paling dominan di setiap kecamatan. Adapun fasilitas yang masih kurang memadai adalah fasilitas kesehatan (7%) dan fasilitas peribadatan (7%). Memang belum semua wilayah memiliki fasilitas kesehatan, baik dalam bentuk Poliklinik, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, dan/atau Apotek yang ideal. Begitu juga jumlah sarana peribadatan yang masih terbatas.

Berdasarkan pada kondisi sebaran fasilitas tersebut, maka pembangunan fasilitas akan lebih tepat apabila diarahkan untuk memenuhi kekurangan fasilitas di wilayah yang masih kekurangan. Kecamatan Patimuan merupakan wilayah kecamatan dengan jumlah fasilitas terendah, dilanjutkan Kecamatan Bantarsari dan Kedungreja. Adapun mengenai pengembangan, maka ketersediaan fasilitas merupakan salah satu syarat untuk melakukan pengembangan. Dengan demikian, wilayah Kecamatan Gandrungmangu merupakan wilayah yang paling tepat untuk melakukan pengembangan, diikuti wilayah Kecamatan Kedungreja dan Bantarsari

Kemampuan Lahan Kawasan

Klasifikasi kemampuan lahan menunjukkan daya dukung tanah-lahan yang merupakan analisis fisik dan lingkungan yang memberikan informasi mengenai kemampuan tanah dalam mendukung kegiatan konstruksi untuk dikembangkan sebagai perkotaan. Adapun kriteria konstruksi untuk daya dukung tanah ini ditetapkan berdasarkan pada peta hasil analisis satuan kemampuan lahan, peta topografi, geologi, hidrologi, dan penggunaan lahan. Kawasan dengan kemampuan pengembangan agak tinggi dapat menjadi kawasan pengembangan lahan terbangun dengan karakteristik lahan:

- relatif datar, baik untuk pengembangan pertanian dan permukiman;
- lereng dengan tingkat kestabilan tinggi;
- mampu mendukung bangunan berat dalam pengembangan perkotaan;
- kemampuan lahan yang rendah dalam mengalirkan air hujan secara alami;
- memiliki potensi bencana yang sedang atau rendah.

Melalui analisis kemampuan lahan, maka dapat diketahui bahwa sebagian besar wilayah kajian didominasi oleh kemampuan lahan dengan klasifikasi kemampuan pengembangan agak tinggi (kelas D), kemampuan pengembangan sedang (kelas C), dan kemampuan pengembangan rendah (kelas B) dengan sebaran data sebagai berikut.

Tabel. 4 Hasil Analisis Kemampuan Lahan Kawasan JJLS

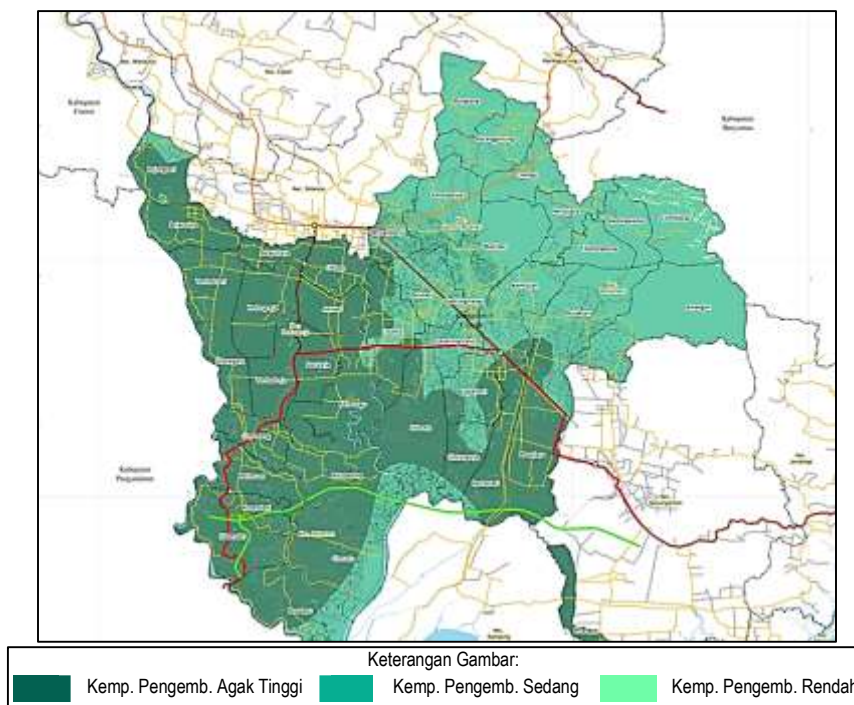
No	Lokasi	Kemampuan Pengembangan Agak Tinggi	Kemampuan Pengembangan Sedang	Kemampuan Pengembangan Rendah	Total (Hektar)
		Kelas D	Kelas C	Kelas B	
1	Kec. Bantarsari	3.115	6.969	137	10.221
2	Kec. Gandrungmangu	3.588	8.256	1	11.845
3	Kec. Kedungreja	7.827	440	-	8.266
4	Kec. Patimuan	6.409	1.505	0	7.915

No	Lokasi	Kemampuan Pengembangan Agak Tinggi	Kemampuan Pengembangan Sedang	Kemampuan Pengembangan Rendah	Total (Hektar)
		Kelas D	Kelas C	Kelas B	
	Jumlah	20.940	17.169	138	38.247

Sumber: Data Primer diolah

Mendasari karakteristik lahan sebagaimana telah disebutkan di atas, maka wilayah yang layak untuk menjadi fokus pembangunan adalah wilayah Kecamatan Kedungreja dan Kecamatan Patimuan. Adapaun untuk wilayah di kecamatan Bantarsari dan Gandrungmangu lebih tepat difokuskan untuk upaya pengembangan dan kawasan pendukung. Selengkapnya gambaran kemampuan lahan untuk pengembangan kawasan adalah sebagai berikut:

Gambar. 3 Peta Analisis Kemampuan Lahan Pengembangan Kawasan JJLS



Lahan yang berkemampuan pengembangan agak tinggi, sebagian besar terletak di sekitar jalur JJLS. Terutama di Kecamatan Patimuan, Kedungreja, dan Bantarsari. Adapun untuk Kecamatan Gandrungmangu, JJLS melewati kawasan lahan yang berkemampuan pengembangan sedang. Berdasarkan

kriteria kelas kemampuan lahan, maka wilayah jalur JJLS yang berpotensi untuk dilakukan pengembangan secara lebih maksimal adalah wilayah di 3 (tiga) kecamatan, yakni Kecamatan Patimuan, Kedungreja dan sebagian Kecamatan Bantarsari. Adapun kecamatan Gandrungmangu dapat menjadi kawasan pendukung pengembangan wilayah lainnya.

Aksesibilitas Wilayah

Perhitungan indeks aksesibilitas dan indeks mobilitas terhadap kinerja jaringan jalan bermaksud menunjukkan tingkat kemudahan suatu wilayah untuk dikunjungi atau dilalui. Semakin tinggi nilai indeks aksesibilitas maka perjalanan akan semakin mudah, dengan standar minimal nilai indeks lebih dari 1,00 (satu). Jalan raya JJLS merupakan salah satu peluang bagi daerah untuk melakukan percepatan pembangunan wilayah. Biaya transportasi semakin murah dengan waktu yang semakin singkat, sehingga dapat lebih efisien dan efektif. Aksesibilitas merupakan aspek penting dalam pengembangan wilayah. Hal ini akan memberikan pengaruh terhadap aspek kehidupan yang lain, sehingga perlu diutamakan penuntasannya, Apabila permasalahan ini telah tuntas, maka akan memudahkan penuntasan aspek permasalahan lainnya

Tabel .5 Indeks Aksesibilitas Kawasan Pengembangan

KECAMATAN	Luas (Ha)	Panjang Jalan (km)	Indeks Aksesibilitas	Rank
Kedungreja	4.331	204	0,0517	1
Bantarsari	9.554	208	0,0254	2
Gandrungmangu	125.319	292	0,0053	3
Patimuan	75.300	158	0,0024	4

Sumber: Data Primer diolah

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa seluruh kecamatan di kawasan pengembangan masih sulit untuk dilalui. Hal ini dapat diketahui dari nilai indeks aksesibilitas yang masih jauh di bawah 1,00. Sulitnya suatu daerah untuk dijangkau akan berakibat pada lambatnya pembangunan dan pengembangan. Dari sekian banyak jalan yang ada pada keempat kecamatan, maka Kecamatan Kedungreja merupakan wilayah yang paling mudah diakses,

dan Kecamatan Patimuan merupakan wilayah yang paling sulit diakses. Berkenaan dengan skala prioritas pembangunan, maka pembangunan guna meningkatkan aksesibilitas wilayah di kecamatan patimuan dapat lebih diprioritaskan daripada wilayah kecamatan yang lain.

Fungsi Kawasan Pengembangan

Setiap wilayah telah memiliki fungsi kawasan. Pusat kegiatan di wilayah kabupaten merupakan simpul pelayanan sosial, budaya, ekonomi, dan/atau administrasi masyarakat di wilayah kabupaten, yang ditentukan secara nasional, meliputi Pusat Kegiatan Nasional, Pusat Kegiatan Wilayah, dan Pusat Kegiatan Lokal. Sedangkan Pusat-pusat lain di dalam wilayah kabupaten yang wewenang penentuannya ada pada pemerintah daerah kabupaten, dalam hal ini meliputi Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).

Tabel. 6 Potensi dan Permasalahan di Wilayah Pengembangan

POTENSI	PERMASALAHAN
Kecamatan Bantarsari (PPK)	
<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat jalan lokal primer • Pengembangan jaringan perpipaan air minum • Pengembangan sistem drainase terpadu untuk kawasan perkotaan • Agrowisata, Curug Lawang, Wisata Outbond Baturin, Curug Mujan • Trayek tetap transportasi darat. 	<ul style="list-style-type: none"> • Rawan bencana longsor dan banjir • Bendung Kebogoran perlu perbaikan • JJLS belum dilengkapi rambu lalu lintas dan PJU • Tingkat pendidikan masyarakat rendah • Tingkat kemiskinan dan pengangguran terbuka
Kecamatan Gandrungmangu (PPL)	
<ul style="list-style-type: none"> • Embung Gandrungmangu dan Embung Kertajaya • UMKM Kopi Robusta • Wisata Cinangsi, Pemancingan Ikan, Wisata Kubang, Damarwulan, Susur Sungai • Komunitas Kampung Youtuber • Mina-Padi di Desa Gintungereja 	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat lokasi rawan banjir • JJLS belum dilengkapi rambu lalu lintas dan PJU • Terdapat pengalihfungsian lahan lindung menjadi budidaya • Tingkat pendidikan masyarakat rendah

POTENSI	PERMASALAHAN
<ul style="list-style-type: none"> Potensi sumber mata air Pasar Desa Gandrungmangu 	<ul style="list-style-type: none"> Tingkat kemiskinan dan pengangguran terbuka
Kecamatan Kedungreja (PPL)	
<ul style="list-style-type: none"> Terdapat Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD-S) Terdapat pengembangan sistem drainase terpadu untuk kawasan rentan banjir Kampung Ikan Sidat UMKM: Sale Pisang, De Coco, Krupuk Lokal Karag, Tepung Mocaf, Pupuk Organik, Madu Tawon, Sandal "Kentir", dan Magot Desa Wisata Bojong Tirta, Wisata Tirta Rengganis, Wisata Sejarah, Wisata Desa Kalimati, Susur Sungai Memiliki trayek umum transportasi darat 	<ul style="list-style-type: none"> rawan bencana longsor dan banjir pemanfaatan lahan sawah menjadi lahan permukiman JJLS belum dilengkapi rambu lalu lintas dan PJU Terdapat pengalihfungsian lahan lindung menjadi budidaya Tingkat pendidikan masyarakat rendah Tingkat kemiskinan dan pengangguran terbuka
Kecamatan Patimuan (PPK)	
<ul style="list-style-type: none"> Terdapat jaringan jalan nasional Pelabuhan Penyeberangan Kelas III Jalur evakuasi bencana banjir Komoditas kelapa UMKM: Sale Pisang, Marning, De Coco, Krupuk Lokal Karag, Agrowisata, Wisata Bahari, Waterboom Trayek umum transportasi darat Ruang terbuka publik (ex Terminal Rawaapu) 	<ul style="list-style-type: none"> Rawan bencana longsor dan banjir pemanfaatan lahan sawah menjadi lahan permukiman JJLS belum dilengkapi rambu lalu lintas dan PJU Tingkat pendidikan masyarakat rendah Tingkat kemiskinan dan pengangguran terbuka

Sumber: Data Primer diolah

Sesuai dengan dokumen RTRW, maka Kecamatan Bantarsari dan Patimuan ditetapkan sebagai Pusat Pelayanan Kawasan, sedangkan Kecamatan Kedungreja dan Gandrungmangu ditetapkan sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan. Pusat Pelayanan Kawasan merupakan kawasan perkotaan yang

berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa, sebagai pusat aktivitas ekonomi, pelayanan administrasi, serta pelayanan lainnya. Sedangkan Pusat Pelayanan Lingkungan merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antardesa.

Terdapat agrowisata di kecamatan Bantarsari dan Patimuan dengan fasilitas trayek umum transportasi darat. Terlebih di kecamatan Patimuan terdapat pelabuhan penyeberangan Kelas III menuju Provinsi Jawa Barat. Untuk kecamatan Gandrungmangu dan Kedungreja terdapat banyak potensi UMKM dan obyek wisata. Komoditas pertanian dan perkebunan di wilayah JJLS merupakan potensi ekonomi lokal yang bernilai. Wilayah perencanaan pengembangan merupakan kawasan pertanian yang masih luas. Terdapat komoditas tanaman perkebunan, tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perikanan dengan sebaran komoditas sebagai berikut:

Tabel. 7 Potensi Ekonomi Lokal di Kawasan Pengembangan

Kecamatan	Tanaman pangan	Perkebunan	Hortikultura	Peternakan	Perikanan
Bantarsari	Padi dan kedelai	Kelapa deres	Pisang	Itik	Udang
Gandrungmangu	Padi dan kedelai	Kelapa deres	Pisang	Itik	Ikan
Kedungreja	Padi	Kelapa deres	Cabai besar	Ayam	Ikan dan sidat
Patimuan	Padi	Kelapa deres	Pisang	Itik	Sidat

Sumber: Data Primer diolah

Padi menjadi tanaman pangan yang mendominasi, begitu juga perkebunan kelapa deres dan tanaman pisang. Adapun peternakan didominasi oleh peternakan itik, sedangkan perikanan didominasi oleh jenis ikan. Jumlah komoditas yang banyak ini menunjukkan keberlangsungan bahan baku, serta peluang bagi daerah untuk menjadi keunggulan wilayah yang layak untuk dikelola dan dikembangkan.

Arah dan Strategi Pengembangan Kawasan

Berdasarkan analisis sebaran fasilitas permukiman, kemampuan lahan, aksesibilitas wilayah, dan fungsi kawasan pengembangan, maka diperoleh rumusan potensi sebagai berikut:

Tabel. 8 Rumusan Potensi wilayah

No	Kecamatan	Sebaran Fasilitas Permukiman	Kemampuan Lahan	Aksesibilitas Wilayah	Fungsi Kawasan
1	Bantarsari	Rendah	Sedang	Rendah (2)	PPK
2	Kedungreja	Rendah	Agak Tinggi	Rendah (1)	PPL
3	Gandrung angu	Rendah	Sedang	Rendah (3)	PPL
4	Patimuan	Sedang	Agak Tinggi	Rendah (4)	PPK

Sumber: Data Primer diolah

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa ada ketidaksesuaian antara penetapan fungsi kawasan dengan kemampuan lahannya, sehingga jika dilakukan pengembangan wilayah akan terkendala dalam pelaksanaannya. Begitu juga dengan aspek aksesibilitas wilayah, terlihat bahwa dari seluruh kecamatan yang tergolong aksesibilitas rendah, ternyata yang paling mudah diakses adalah kecamatan kedungreja yang berstatus PPL, sementara yang ditetapkan sebagai PPK adalah kecamatan Bantarsari dan Patimuan yang tingkat aksesibilitasnya lebih rendah daripada Kecamatan Kedungreja. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan yang dilaksanakan selama ini kurang memperhatikan fungsi kawasan, sehingga kawasan tersebut kurang dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Apabila hal ini akan dijadikan dasar pengembangan maka diperlukan biaya yang lebih besar untuk perbaikan aksesibilitas yang lebih baik.

Jalan Jalur Lintas Selatan dimanfaatkan menjadi pemantik pembangunan dan pengembangan wilayah, dengan asumsi bahwa Kabupaten Cilacap sebagai garda perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Barat. Ketetapan mengenai fungsi kawasan sudah menjadi kebijakan pemerintah, sehingga perlu diprioritaskan. Begitu juga dengan sebaran fasilitas dan kepadatan penduduk, merupakan dampak alamiah yang harus diperhatikan dalam menyusun perencanaan. Dengan adanya peluang JJLS, maka wilayah yang menjadi PPK diarahkan untuk menjadi pusat pelayanan utama, adapun yang berstatus PPL

difungsikan sebagai kawasan pendukung, dengan rincian rencana arah pengembangan wilayah sebagai berikut:

Tabel. 9 Arah pengembangan wilayah

No	Kecamatan	Fungsi	Keterangan	Keunggulan
1	Bantarsari (PPK)	Agrowisata	Mendistribusikan hasil potensi pertanian dari kecamatan lainnya	pertanian dan pariwisata
2	Kedungreja	Pusat Pertumbuhan Baru	Gerbang masuk yang memiliki Aksesibilitas mumpuni.	UMKM, perikanan dan pariwisata
3	Gandrung-mangu	Pusat Kegiatan	Melayani kecamatan lainnya.	-
4	Patimuan (PPK)	Garda Perbatasan	Sub Pusat Kegiatan yang didukung dengan kelengkapan sarana dan prasarana	perikanan, pertanian, dan UMKM

Sumber: Data Primer diolah

Kabupaten Cilacap bagian barat diarahkan untuk menjadi pusat kegiatan agropolitan (Surya et al., 2021) yang berfungsi sebagai

- a. Pusat perdagangan dan transportasi pertanian (*agricultural trade/transport center*).
- b. Penyedia jasa pendukung pertanian (*agricultural support services*).
- c. Pasar konsumen produk non-pertanian (*non agricultural consumers market*).
- d. Pusat industri pertanian (*agro-based industry*).
- e. Penyedia pekerjaan non pertanian (*non-agricultural employment*).
- f. Pusat agropolitan dan *hinterland*-nya terkait dengan sistem permukiman nasional, provinsi, dan kabupaten (RTRW Propinsi/ Kabupaten).

Sehubungan dengan hal itu, maka diperlukan upaya untuk menentukan unit-unit kawasan pengembangan yang berfungsi sebagai pusat produksi pertanian (*agricultural production*); intensifikasi pertanian (*agricultural intensification*); pusat pendapatan perdesaan dan permintaan untuk barang-barang dan jasa non pertanian (*rural income and demand for non-agricultural goods and services*); dan produksi tanaman siap jual dan *diversifikasi* pertanian (*cash crop production and agricultural diversification*). Dalam rangka mewujudkan arah pengembangan wilayah tersebut, disusunlah beberapa strategi yang memungkinkan untuk dilakukan, yaitu:

- a. Peningkatan dan Pemerataan Aksesibilitas, berupa pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan prasarana yang mendukung peningkatan produk pertanian (Kec. Patimuan dan Gandrungmangu) dan aksesibilitas kegiatan wisata (Kec. Bantarsari dan Kedungreja), diantaranya: jaringan jalan, irigasi, sumber-sumber air, dan jaringan utilitas (listrik dan telekomunikasi). Dukungan infrastruktur yang membentuk struktur ruang tersebut nantinya mampu mendukung pengembangan kawasan agropolitan
- b. Optimalisasi Upaya Mitigasi Bencana di Lokasi Rawan Bencana, berupa upaya preventif dan memaksimalkan penanggulangan bencana seperti penghijauan dan pembuatan jalur-jalur evakuasi bencana, serta sistem informasi bencana.
- c. Pengembangan Agrikultur dan Minapolitan untuk memaksimalkan potensi pertanian dan perikanan. Sektor – sektor pertanian dan/atau perikanan yang ditetapkan menjadi sektor unggulan merupakan sektor yang sudah berkembang dan didukung oleh sektor hilirnya, banyak melibatkan pelaku dan masyarakat (sesuai dengan kearifan lokal), dan mempunyai skala ekonomi yang memungkinkan untuk dikembangkan dengan orientasi ekspor. Pengembangan *agricultural* dan *minapolitan* dapat ditempuh dengan pengoptimalan potensi trayek angkutan umum transportasi darat untuk mendukung kegiatan agropolitan dan agrowisata, pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan petani, pengembangan Pasar Sub Terminal Agrobisnis (STA) di setiap kecamatan dan pembangunan Pasar Ekspor Komoditas di Kecamatan Tertentu, serta

perluasan jaringan pemasaran hasil agropolitan untuk menarik investasi lebih banyak

- d. Pengembangan Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM), berupa pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan dan penyuluhan mengenai pemanfaatan potensi daerah yang dimiliki dan bisa diarahkan ke pengembangan industri mikro, pendampingan kegiatan UMKM lokal terutama untuk mendukung promosi, serta pengembangan potensi pasar desa sebagai sentral kegiatan perekonomian desa.
- e. Pengendalian Pemanfaatan Kawasan Lindung untuk mempertahankan fungsi kawasan serta dapat menjadi kegiatan pariwisata yang berbasis alam, berupa peningkatan dan perbaikan jalan yang menjadi jalur lalu lintas kegiatan wisata, Pengendalian pemanfaatan ruang terutama di kawasan lindung, serta pengoptimalan potensi sumber mata air sebagai bahan baku air bersih

Penutup

Pembangunan nasional JJLS trase batas Jawa Barat-Patimuan-Bantarsari memberikan pengaruh pada Pemerintah Kabupaten Cilacap untuk melakukan upaya percepatan pembangunan dan pengembangan wilayah. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa wilayah pengembangan terbagi menjadi 2 (dua) kelas kemampuan lahan, yaitu kelas kemampuan pengembangan agak tinggi dan kelas sedang, dengan ciri khas konsentrasi fasilitas dan tingkat kerapatan sangat tinggi yang masih terpusat di ibu kota kecamatan. Tanaman pangan padi masih menjadi sektor ekonomi basis yang mendominasi di tiap kecamatan, tetapi belum dikembangkan secara optimal.

Adapun strategi pengembangan wilayah yang direkomendasikan berupa pengembangan wilayah berbasis ekonomi lokal melalui kegiatan agrikultur, perikanan, dan Usaha Kecil Mikro Menengah (UMKM), yang dapat dilaksanakan dengan jalan meningkatkan aksesibilitas ke semua wilayah dan kapasitas-kerapatan jaringan jalan, mendukung perkembangan kawasan-kawasan perkotaan kecil PPK dan PPL untuk meningkatkan kinerja penciptaan dan penyebaran kesejahteraan masyarakat, mengintegrasikan potensi kawasan-kawasan perkotaan dengan strategi kombinasi dan diferensiasi pengembangan,

dan pemenuhan Infrastruktur sesuai dengan kebutuhan dari pengolahan komoditas yang dimiliki, serta sarana pendukungnya.

Persoalan yang ditemukan dalam upaya pengembangan wilayah kawasan JJLS trase batas Jawa Barat – Patimuan – Bantarsari adalah persoalan dalam aspek aksesibilitas untuk menjangkau kawasan pengembangan serta persoalan kebutuhan pemenuhan sarana kesehatan masyarakat.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada Rayyan Malik, ST, MT, selaku direktur CV. HRV Planner Consultant karena telah membantu proses penelitian.

Pendanaan

Penulisan artikel ini dilakukan atas pembiayaan dari Dana APBD Kabupaten Cilacap Tahun 2022 dengan kontrak berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Bappeda Kabupaten Cilacap Nomor: 004/PPK/JJLS/Bappeda/2022.

Daftar Pustaka

- Chen, Y. C. (2017). *A Tutorial on Kernel Density Estimation and Recent Advances. Biostatistics and Epidemiology*, 1(1). <https://doi.org/10.1080/24709360.2017.1396742>
- Hashimoto, S., Yoshiki, S., Saeki, R., Mimura, Y., Ando, R., & Nanba, S. (2016). Development and application of traffic accident density estimation models using kernel density estimation. *Journal of Traffic and Transportation Engineering (English Edition)*, 3(3). <https://doi.org/10.1016/j.jtte.2016.01.005>
- Indrawati, L., & Cahyono, A. (2018). Pemanfaatan Data Landsat Multitemporal Untuk Pemetaan Pola Ekspansi Perkotaan Secara Spasiotemporal (Studi Kasus Pada Tiga Perkotaan Metropolitan Di Pulau Jawa). *Jurnal Nasional Teknologi Terapan (JNTT)*, 2(1). <https://doi.org/10.22146/jntt.39091>
- Mayulu, H., & Daru, T. P. (2020). Kebijakan pengembangan peternakan berbasis kawasan: Studi kasus di Kalimantan Timur. *Journal of Tropical AgriFood*, 1(2). <https://doi.org/10.35941/jtaf.1.2.2019.2583.49-60>
- Muktiali, M. (2017). Analisis Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Dengan Menggunakan Pendekatan Sistem Informasi Geografis Dan Chart Priority.

Forum Ekonomi Dan Sosial Ke-1.

- Muliani, ., Adrianto, L., Soewardi, K., & Hariyadi, S. (2018). Sistem Sosial Ekologi Kawasan Desa Pesisir Kabupaten Subang. *Jurnal Ilmu Dan Teknologi Kelautan Tropis*, 10(3). <https://doi.org/10.29244/jitkt.v10i3.20597>
- Mulyati, T. (2018). Analisis Kontribusi Sektoral Terhadap PDRB Untuk Pembangunan Ekonomi (Studi di Kabupaten Madiun). *Journal of Economics Development Issues*, 1(2). <https://doi.org/10.33005/jedi.v1i2.20>
- Nugroho, A. A. (2018). Pembangunan Ekonomi Berbasis Potensi Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat: Analisis Pengembangan Ekonomi Kabupaten Ngawi. *Jurnal Pembangunan Dan Kebijakan Publik*, 8(2).
- Srivani, M., Weriantoni, W., Lukman, L., Erizal, E., Utami, Z., & Fibrian, F. (2018). Analisis Potensi Ekonomi Dalam Strategi Pembangunan Dan Pengembangan Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 7(3).
- Surya, B., Saleh, H., Hamsina, H., Idris, M., & ... (2021). Rural Agribusiness-based Agropolitan Area Development and Environmental Management Sustainability: Regional Economic Growth Perspectives. In *Int. J. Energy Econ researchgate.net*.
- Triyanto, I. Y., & Keban, Y. T. (2019). Disparitas Wilayah antar Kecamatan di Kabupaten Sleman. *Jurnal Litbang Sukowati : Media Penelitian Dan Pengembangan*, 3(1). <https://doi.org/10.32630/sukowati.v3i1.111>
- Wenny Widya Wahyudi, Era Triana, & Harne Julianti Tou. (2020). Arahana Pengembangan Wilayah Berbasis Produk Unggulan. *JURNAL REKAYASA*, 10(1). <https://doi.org/10.37037/jrftsp.v10i1.50>
- Zai, V. R. C. (2018). Analisis Pengembangan Wilayah dengan Pendekatan Sektoral dan Regional di Kabupaten Bogor. *Seminar Nasional Geomatika*, 2. <https://doi.org/10.24895/sng.2017.2-0.411>